

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

*Good governance* pemerintahan yang baik atau tata kelola merupakan isu penting dalam manajemen sektor publik saat ini. *Good governance* menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki peran penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan terkait tata kelola pemerintahan daerah, seperti rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus korupsi, regulasi, dan buruknya pelayanan publik di beberapa daerah.

Peran inspektorat daerah sebagai auditor internal pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Keberadaan inspektorat yang efektif diajarkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik akuntansi.

Budaya organisasi juga berperan penting dalam mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Budaya organisasi yang lemah, seperti toleransi

terhadap korupsi dan nepotisme, dapat mendorong terjadinya penyimpangan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu membangun budaya organisasi yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung penerapan *good governance* di sektor publik. SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kota Kupang untuk laporan keuangan tahun 2019. Yang mana terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp1,268 Triliun pada 4 Pemda di NTT untuk tahun 2019 Pemerintah menjelaskan penyebab utama perencanaan kurang matang dari masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan konsep *value for money* yang merupakan dasar dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh para pimpinan dan perencana SKPD sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif dan anggaran tidak dapat diserap secara optimal.

Sisa anggaran yang cukup besar mengindikasikan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan anggaran oleh pemda, yang merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan agar tidak terjadi sisa anggaran yang signifikan.

Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan anggaran oleh pemda. Sisa anggaran yang terjadi dapat mengindikasikan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat. Peran inspektorat dalam melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan perlu ditingkatkan agar pengelolaan anggaran dapat lebih efektif.

Budaya organisasi dalam pemda yang kurang berorientasi pada kinerja dan efisiensi pengelolaan anggaran dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya sisa anggaran. Perlu ada upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya organisasi yang mendorong pemanfaatan anggaran secara optimal dan bertanggung jawab.

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang belum optimal di lingkungan pemda dapat menyebabkan lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran. Komponen-komponen sistem pengendalian intern pemerintah, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan perlu ditingkatkan untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

Keberadaan inspektorat daerah yang efektif, budaya organisasi yang mendukung, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mampu diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang kuat dapat melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, sementara budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh peran inspektorat daerah, budaya organisasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketiga tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Payangan (2017) menemukan bahwa peran inspektorat daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*. Inspektorat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ruspina (2013) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di pemerintah daerah. Budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, keadilan, dan orientasi pelayanan publik dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati dkk, (2022) menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah yang berjalan dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh peran inspektorat daerah, budaya organisasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap *good governance*, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini akan mengintegrasikan faktor ketiga tersebut dan menguji pengaruhnya secara simultan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *good governance* di pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sektor publik, khususnya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mendukung penerapan *good governance* di pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAERAH, BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut

1. Apakah Peran Inspektorat berpengaruh secara parsial terhadap penerapan *Good Governance* ?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan *Good Governance* ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh parsial terhadap penerapan *Good Governance* ?
4. Apakah Peran Inspektorat Daerah, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *Good Governance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Inspektorat Daerah berpengaruh secara parsial terhadap penerapan *Good Governance* ?
2. Untuk mengetahui Budaya Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap penerapan *Good Governance* ?
3. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh parsial terhadap penerapan *Good Governance* ?

4. Untuk mengetahui Peran Inspektorat Daerah, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *Good Governance* ?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan kemampuan bagi penulis.

2. Bagi Inspektorat Kota Kupang

Dapat memberikan masukan atau opini guna membantu Inspektorat daerah Kota Kupang.

3. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.